

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Hutan merupakan ekosistem didalamnya menampung berbagai organisme yang terbagi menjadi unsur biotik dan abiotik. Tentunya terdapat berbagai hutan di dunia yang sesuai dengan kondisi iklim negara masing-masing yang secara geografis berbeda-beda. Hutan sebagai organ tubuh bagian dari bumi, dimana bermacam-macam flora, fauna, sumber daya mineral serta berbagai kekayaan lainnya yang dapat diambil dari hutan yang tidak tergantung untuk kehidupan manusia. Selain itu juga, hutan sebagai penyedia sumber daya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik yang dialami secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat tidak langsung adalah hal-hal yang diperoleh dari adanya hutan, misalnya manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan badan air, pengendalian erosi, dan manfaat lainnya. Manfaat langsung adalah hal-hal seperti kayu untuk bahan bangunan, menyediakan bahan pangan atau mendapatkan mineral seperti batu bara atau emas dari tanah.

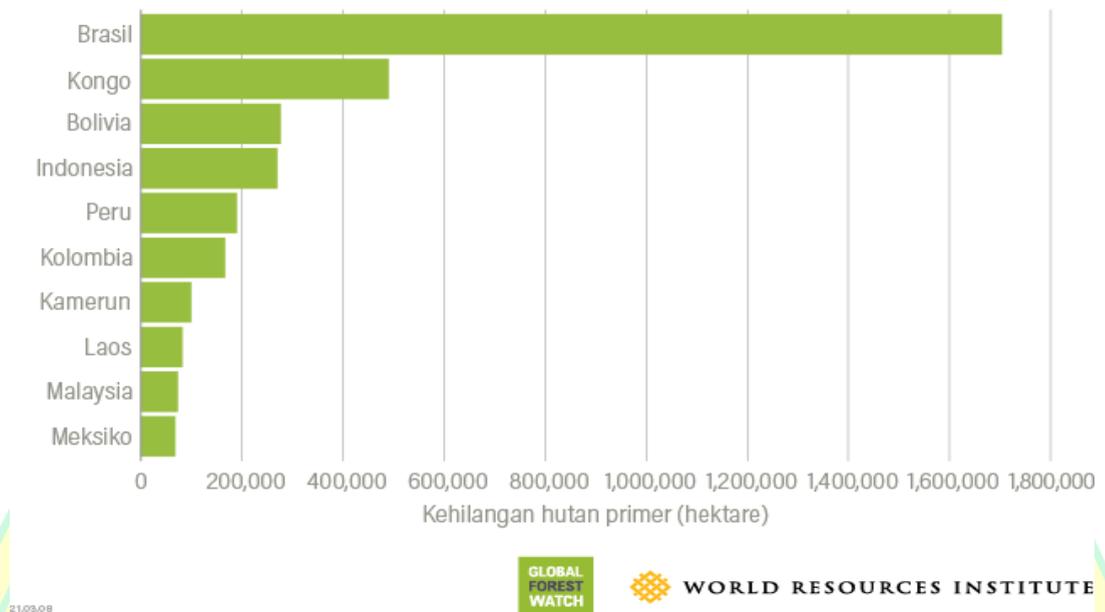
Eksplorasi penggunaan sumber daya hutan secara besar-besaran akan merusak hutan dan akibatnya mengubah fungsi hutan. Kerusakan hutan sering disamakan dengan deforestasi. Deforestasi adalah kehilangan atau berkurangnya luas kawasan lahan hutan tertentu akibat kegiatan manusia seperti penebangan liar, pencurian hasil hutan, kebakaran liar, perladangan berpindah dan penggembalaan liar. Hutan semakin rusak oleh sebab-sebab alami seperti letusan gunung berapi, petir, banjir dan tsunami. Informasi terbaru yang didapat dari *University of Maryland*, bersumber dari *Global Forest Watch*, menunjukkan bahwa Pada tahun 2020, hutan tropis kehilangan 12,2 juta hektar, dari luas kehilangan tersebut sebesar 4,2 juta hektar hutan primer atau setara dengan negara Belanda yang memiliki fungsi untuk penyimpanan karbon dan keanekaragaman hayati. Emisi karbon dioksida (2,64 Gt CO₂) yang disebabkan oleh hilangnya hutan asli setara dengan emisi tahunan 570 juta mobil, yang dua kali lebih banyak jumlahnya dari mobil di jalan raya Amerika. Pada tahun 2020 tingkat deforestasi hutan primer 12% lebih tinggi dari sebelumnya dan itu terjadi dua tahun berturut-turut daerah tropis kehilangan hutan primer yang semakin memburuk.



Sumber : (Goldman, 2021)

Gambar 1.1 Data kehilangan Hutan Primer Tropis Dunia

Tahun 2020 harus menjadi tahun yang penting dalam perang melawan deforestasi yang terjadi. Banyak kelompok yang berbeda telah sepakat untuk mencoba mengurangi separuh atau menghentikan deforestasi sama sekali pada tahun ini. Hilangnya hutan tropis primer yang terus berlanjut menunjukkan bahwa umat manusia belum mencapai tujuan ini. Sering diamati bahwa akhir-akhir ini perusakan lingkungan hutan akibat ulah manusia menjadi dalih untuk menghasilkan lebih banyak material, secara tidak langsung kegiatan ini menyebabkan erosi lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup manusia yang biasa dikenal dengan daya dukung lingkungan.



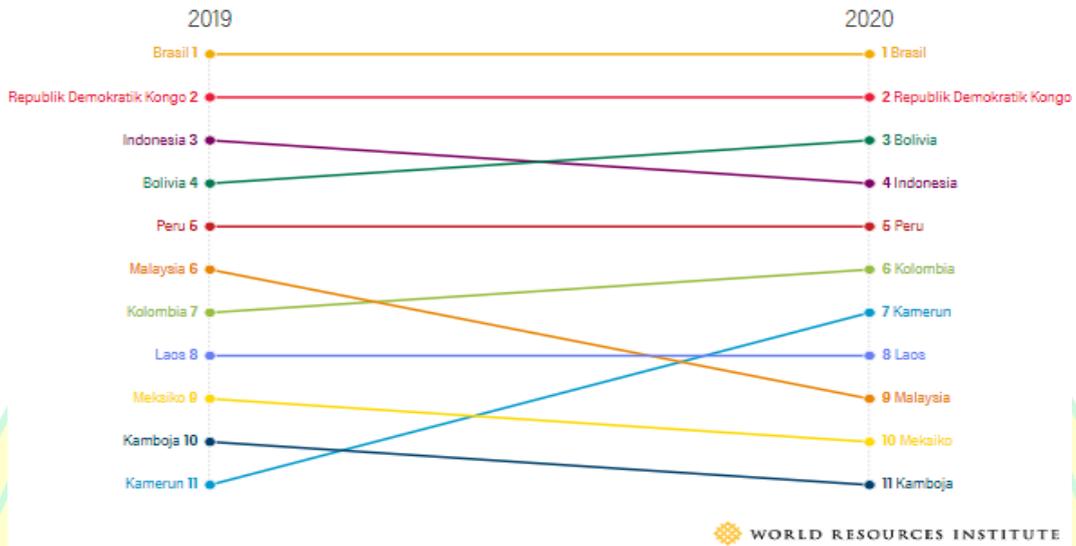
Sumber : (Goldman, 2021)

Gambar 1.2 Data Negara yang mengalami kehilangan Hutan Primer Tertinggi Dunia

Tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, deforestasi disebabkan pengolahan produksi bahan mentah menjadi penyebab utama hilangnya hutan (baik hutan sekunder maupun primer) di Asia Tenggara dan Amerika Latin. Ladang berpindah juga merupakan salah satu penyebab utama tutupan pohon di area tropis Afrika. Sistem ini diterapkan oleh warga yang tinggal di kawasan atau di pinggir hutan. Bercocok tanam masih sederhana yaitu menebang pohon dan membakar habis pepohonan, namun lahan tidak langsung digarap dan ditanami. Lahan tersebut hanya digunakan selama 3-4 tahun dan setelah itu ditinggalkan lalu hutan baru ditebang seperti semula. Sistem tanam berpindah ternyata tidak berdampak negatif terhadap lingkungan karena luas yang akan dibuka sempit (2-3 hektar) dan lahan tidak digarap secara intensif, tetapi karena jumlah penduduk yang terus bertambah dan kesadaran teknologi yang semakin meningkat, area jumlah penebangan hutan meningkat dan juga waktu area yang belum berkembang (periode musim gugur) dipersingkat. Selain itu, kebakaran dan efek terkait iklim lainnya terus memainkan peran penting baik di daerah tropis maupun di luarnya.

Perubahan peringkat negara berdasarkan total kehilangan hutan primer

Indonesia tidak masuk ke dalam peringkat tiga besar untuk pertama kalinya, sementara Kamerun naik ke peringkat tujuh



Sumber : (Goldman, 2021)

Gambar 1.3 Perubahan Peringkat Negara yang mengalami kehilangan Hutan Primer

Dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan luas deforestasi di hutan primer Indonesia. *Global Forest Watch* mengeluarkan data yang menyatakan luas hutan Indonesia berkurang hanya 270.000 hektare (ha) pada tahun 2020, lebih sedikit jika dibandingkan dengan sebelumnya dengan capaian 323,6.000 hektar. Namun, kerusakan hutan di Indonesia masih masuk dalam jajaran sepuluh besar dunia tahun lalu. Indonesia berada di urutan empat, bersama dengan Bolivia dan Peru. Brasil terus menjadi negara yang hutan primernya akan berkurang paling banyak pada tahun 2020 yaitu 1,7 juta hektar. Kemudian berikutnya Republik Demokratik Kongo, yang kehilangan 491.000 hektar hutan primer. Di Bolivia 277.000 hektar hutan dihancurkan. Peru di bawah Indonesia kehilangan 166.000 hektar. Kolombia menempati urutan keenam karena hilangnya 166.000 hektar hutan harta karun. Kemudian Kamerun mencatat hilangnya 100.000 hektar hutan primer. Laos kehilangan 89,7 ribu hektar dan Malaysia 73 ribu hektar hutan purba. Pada saat yang sama, Meksiko mencatat kehilangan 68,4 ribu hektar hutan primer. Sementara itu, penurunan hutan miskin di seluruh dunia mencapai 4,21 juta hektar pada 2020. Ini merupakan kehilangan yang lebih luas jika dibandingkan sebelumnya yang hanya kehilangan 3,75 juta hektar. Deforestasi mengacu pada

hilangnya atau degradasi hutan yang terjadi secara alami terutama sebagai akibat dari aktivitas manusia, seperti pembuangan bahan bakar, pembukaan lahan untuk penggembalaan ternak, penambangan, ekstraksi minyak, pembangunan bendungan dan urban sprawl atau jenis pembangunan dan pertumbuhan penduduk lainnya. Deforestasi tidak selalu disengaja, kadang-kadang dapat disebabkan oleh proses alami, seperti kebakaran, atau oleh kepentingan manusia, seperti penggembalaan ternak atau satwa liar.

Deforestasi berkontribusi secara signifikan terhadap emisi gas rumah kaca global dan perubahan iklim (Harris et al., 2012). Pada saat yang sama, banyak orang yang tinggal di dalam atau di dekat hutan ini sangat bergantung pada sumber daya hutan, dan penghidupan mereka terancam oleh deforestasi dan penggunaan hutan yang tidak lestari (Sunderlin et al., 2005). Akibatnya, pemerintah dan lembaga donor internasional mencari solusi untuk melestarikan sumber daya hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, sembari mengakui hak atas hutan adat (Persha et al., 2011). Program pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah menjadi strategi umum di banyak negara berkembang pada tahap pengembangan dan penerapan kebijakan dan proyek percontohan (Resosudarmo et al., 2014; Rasolofson et al., 2015, 2016). Diperkirakan 4 juta kilometer persegi lahan dianggap sebagai lahan hutan masyarakat di negara-negara seperti Indonesia, Madagaskar, Bolivia, Kolombia, dan Peru (Sunderlin et al., 2008).

Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, telah ditetapkan luas hutan Indonesia menjadi 95,6 juta hektar pada tahun 2020, dan proporsi luas daratannya sekitar 50,9%. yang luas hutannya 88,4 juta hektar atau 92,5 berada di dalam kawasan hutan. Pencapaian ini merupakan pencapaian tersendiri karena pencapaian ini merupakan pengurangan deforestasi terbesar dalam sejarah yang mendapat pengakuan internasional seiring meningkatnya deforestasi di seluruh dunia. Pada musim 2019-2020, muncul 115,5 ribu hektar hutan bersih di kawasan hutan Indonesia baik di dalam maupun di luar kawasan. Angka ini diperoleh dari deforestasi bruto seluas 119.100 hektar dikurangi laju penghijauan seluas 3.600 hektar (data pemantauan satelit).

Deforestasi bersih adalah pengurangan atau perubahan tutupan lahan hutan selama periode waktu tertentu. Pencapaian ini merupakan pencapaian yang

membanggakan terkait dengan fungsi hutan sebagai faktor pendukung keseimbangan alam, dimana hutan tropis Indonesia diketahui mengandung energi mikrobiologis yang dibutuhkan dunia. Laju deforestasi Indonesia telah menurun selama empat tahun berturut-turut, dan Indonesia dianggap sebagai salah satu dari sedikit negara yang berhasil mencapai titik tersebut. Indonesia adalah salah satu negara yang menempati peringkat tiga besar untuk kehilangan hutan primer setelah data dikumpulkan. Lajupenurunan hutan garapan dapat disajikan dalam tabel yang diambil dari *World Resources Institute* (2020) melalui laman resminya.



Sumber : (Goldman, 2021)

Gambar 1.4 Tingkat kehilangan hutan Indonesia periode 2002 – 2020

Hutan dianggap sebagai tempat penting yang bernilai bagi makhluk hidup, baik untuk menunjang kehidupan manusia, hewan dan terutama tumbuhan. Hutan juga berperan dalam mengurangi polusi udara, mendaur ulang karbondioksida untuk melindungi dan menopang kehidupan di bumi, menyediakan air bersih serta mengatur suhu dan kelembapan. Pada konsultasi KLHK akhir tahun 2021, Rwanda A. Sugardiman yang menjabat sebagai Dirjen Planologi Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan (PKTL) menyatakan bahwa “Luas kawasan hutan di Indonesia yaitu 125.797.052 Ha dengan realisasi penetapan hingga Desember 2021 seluas 90.233.159 Ha dengan jumlah surat keputusan penetapan 2.157 SK. Terjadi lonjakan luas penetapan kawasan hutan dalam periode 10 tahun terakhir secara signifikan menjadi total sebesar 72% dari total luas kawasan hutan Indonesia.”. Hasil pemantauan hutan Indonesia pada 2022 menunjukkan bahwa luas lahan

berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 96,0 juta hektare atau 51,2 % dari total daratan. Dari luas tersebut, 92,0% dari total luas berhutan atau 88,3 juta hektar berada di dalam kawasan hutan. Keadaan tersebut menambah semangat dan ketertarikan penulis, mengingat masyarakat sangat memperhatikan kegiatan hutan tidak hanya sebagai sarana penghidupan dan sebagai penyeimbang kondisi alam.

Berdasarkan data yang diunggah oleh *World Natural Resources Institute* tentang luasan deforestasi di Indonesia antara tahun 2002 dan 2020, terjadi fluktuasi penurunan dan peningkatan deforestasi, dengan kehilangan hutan tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sekitar 0,9 juta hektar. dan kehilangan hutan terendah terjadi antara tahun 2003 hingga 2020, yaitu hanya sekitar 0,2 juta hektar. Terlihat juga bahwa dalam empat tahun terakhir sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 terjadi penurunan yang terus menerus, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah secara konsisten telah melakukan langkah-langkah penanggulangan deforestasi di Indonesia, misalnya pemerintah secara langsung melakukan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan, menanggulung sementara izin alih fungsi hutan dan memberlakukan moratorium permanen terhadap konversi hutan pusaka menjadi hutan gambut.

Kebijakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh elemen masyarakat pada umumnya, peran masyarakat tidak kalah pentingnya dalam proses perlindungan hutan di Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan berkelanjutan sektor kehutanan merupakan faktor yang sangat penting. Selain kemungkinan menjadi mitra, masyarakat juga bisa menjadi pihak yang berkonflik dengan pemerintah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat merupakan ukuran keberhasilan kebijakan yang dilembagakan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan disebut sebagai pengelolaan hutan yang berorientasi pada masyarakat, yang didasarkan pada kondisi dan tradisi setempat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Dr. H, Joni, S.p., S.H., M.H., Dalam Bahasa sederhana, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan deforestasi dan degradasi hutan, antara lain: Faktor alam. Dalam hal ini ada beberapa faktor alamiah yang bisa menjadi penyebab deforestasi hutan seperti letusan gunung berapi tsunami,

maupun serangan hama dan penyakit yang bisa juga menyerang vegetasi lokal

1. Akibat ulah manusia. Dalam hal ini gundulnya hutan di Indonesia mungkin sebagai besar merupakan akibat ulah manusia itu sendiri demi mengeruk keuntungan pribadi dan kelompok tertentu tanpa memperhatikan konsekuensinya pada alam. Contoh perbuatan manusia yang menyebabkan deforestasi hutan antara lain:

- 1) Pembakaran hutan
- 2) *Illegal logging*
- 3) Perkebunan monokultur
- 4) Perkebunan kelapa sawit
- 5) Konversi lahan gambut menjadi sawah
- 6) Pertambangan
- 7) Transmigrasi
- 8) Pemukiman yang terus berkembang

2. Akibat kebijakan, bahwa akar masalah yang dihadapi yang mewujudkan kinerja pengurusan hutan yang terfokus pada masalah prakondisi, antara lain: konflik kebijakan penataan ruang, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kapasitas pengurusan hutan, serta ketiadaan institusi pengelola hutan Kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

3. Kebijakan pengelolaan hutan yang kurang tepat. Kerusakan hutan juga dapat terjadi karena kebijakan yang dibuat lebih memperhatikan segi ekonomis dibandingkan dengan segi ekologis.

Hasil evaluasi BPS (2007,2009) menunjukkan adanya 19.420 desa di dalam Kawasan hutan di 32 Provinsi, desa-desa tersebut teridikasi berada di dalam Kawasan hutan lindung sebanyak 6.243 desa, di dalam hutan konversi sebanyak 2.270 desa, di dalam Kawasan hutan produksi sebanyak 7.467 desa dan di dalam hutan produksi terbatas sebanyak 4.744 desa. Disamping itu juga terdapat di dalam Kawasan hutan produksi konversi 3.848 desa. Data tersebut menunjukkan bahwasanya banyak desa yang dihuni oleh masyarakat tradisional berada dikawasan hutan. Desa-desa tersebut umumnya dihuni oleh masyarakat tradisional. Disisi lainnya kebijakan kehutanan belum memberi kesempatan bagi masyarakat tradisional dengan kearifan adatnya untuk mengelola hutan secara berkelanjutan,

padahal kearifan local telah terbukti berhasil dipraktekkan selama ratusan atau bahkan ribuan tahun dalam melindungi Kawasan hutan. Pengetahuan dan kearifan local dalam mengelola alam sudah tidak mendapat tempat yang layak dalam usaha produksi, atau bahkan dalam kurikulum Pendidikan formal kehutanan.

Dalam profil dan progress pengelolaan 12 KPHK Non Taman Nasional (2015) KEMENLHH, Kawasan KPHK Dangku Bentayan telah mengalami tekanan dan degradasi Kawasan. Tantangan yang dihadapi oleh pengelola diantaranya adalah adanya pemukiman dalam Kawasan SM Bentayan. Kegiatan perambahan di SM bentayan telah terjadi sejak 2004. Tercatat seluas 11.404 Ha telah dirambah untuk dijadikan sebagai kebun karet , kelapa sawit, pemukiman, kebun masyarakat, kebuncampuran karet dan sawit serta sumur bor oleh kegiatan penambangan.

Dikutip dari buku *Konsep Menuju Pembangunan Kawasan Esensial Koridor Satwa: Kawasan Hutan Harapan-Suaka Margasatwa Dangku Provinsi Sumatera Selatan* yang diterbitkan Dinas Kehutanan Sumsel, pada 2013, penggunaan lahan di lansekap Dangku didominasi oleh berbagai status kawasan hutan, seperti HTI, perkebunan sawit, eksplorasi migas dan batubara, serta sebagian kecil dijadikan pemukiman penduduk. Perusahaan migas yang beroperasi di sekitar Suaka Margasatwa Dangku yakni ConocoPhillip, dua HTI, empat perusahaan sawit. sementara warga di sekitar lansekap Dangku menetap di 15 desa. Ke-15 desa itu Desa Peninggalan, Simpang Tungkal, Pangkalan Tungkal, Berlian Jaya, Tampang Baru yang masuk Kecamatan Bayung Lencir. Lalu Desa Pangkalan Bulian, Lubuk Bintialo, Bukit Pangkuasan, Bukit Sejahtera, Bukit Selabu, Saud, Talang Buluh, dan Sako Suban yang masuk Kecamatan Batanghari Leko. Ditambah Desa Macang Sakti dari Kecamatan Sanga Desa dan Desa Dawas dari Kecamatan Keluang.

Dalam UU cipta kerja (1) Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan pasal 28 dapat dilakukan kegiatan perhutanan sosial. (2) Perhutanan sosial sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan kepada : a. Perseorangan, b. Kelompok tani hutan, dan c.koperasi". Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Marga Alam dan Kawasan Pelestarian alam. Pasal 12 mitra konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat yaitu perseorangan

masyarakat, kelompok masyarakat dan atau pemerintah desa. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10./2016 Tentang Perhutanan Sosial, Pasal 40 point (1). Pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan.

Penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan atau yang diistilahkan dengan *Community Based Forest Management (CBFM)* sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Seperti halnya Swati Negi, Thu Thuy Pham, Bhaskar Karky dan Claude Garcia (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *Role of Community and User Attributes in Collective Action: Case Study of Community-Based Forest Management in Nepal* dengan hasil menunjukkan bahwa di antara variabel yang diteliti, ukuran kelompok (jumlah pengguna hutan yang berafiliasi dengan hutan rakyat) dan persepsi pengelolaan Selaras dengan penelitian penelitian sebelumnya terkait CBFM, Ary Widiyanto dalam *Indonesian Journal of Forestry Research* Vol. 6, No. 1, (2019) yang berjudul *Factors Influencing Farmers Decision In Community-Based Forest Management Program, Kph Ciamis, West Java* dimana hasil penelitian hutan rakyat mereka merupakan prediktor kuat partisipasi pengguna hutan dalam pengelolaan hutan rakyat. Ketimpangan pendapatan dan keragaman etnis ditemukan tidak memiliki hubungan yang signifikan. Namun, ketimpangan lahan ditemukan menurunkan partisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan rakyat. Atribut komunitas dan pengguna ini memainkan peran penting dalam keberhasilan tindakan kolektif dan dapat bervariasi dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Oleh karena itu mereka perlu dipertimbangkan dengan baik oleh para praktisi sebelum intervensi proyek berbasis masyarakat untuk merangsang tindakan kolektif yang berhasil. Kemudian Kurniawati Ilmi dalam penelitiannya yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Paliyan Kabupaten Gunungkidul* yang menjelaskan bahwa Dari aspek masyarakat dan pemerintah tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah cukup berhasil. Sedangkan dari aspek swasta (proyek) tingkat keberhasilan pemberdayaan dilihat dari adanya dukungan penuh masyarakat sehingga prosentase hidup tanaman mencapai 94%.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat

adalah ketergantungan masyarakat terhadap hutan, sumber daya manusia, proses pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan proyek. Selanjutnya dipertegas oleh Ferdinal Asmin, Dudung Darusman, Iin Ichwandi and Didik Suharjito dalam penelitiannya yang dimuat pada media jurnal *Forest and Society*. Vol. 3(1) (2019) yang berjudul *Mainstreaming community-based forest management in West Sumatra: Social forestry arguments, support, and implementation* membahas mengenai bagaimana cara mempertimbangkan tantangan yang harus diatasi, termasuk pendekatan pemberian hak pengelolaan untuk mengamankan suatu kawasan pengelolaan, proses pengembangan kelembagaan partisipatif, sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi untuk mengatasi degradasi hutan dan deforestasi, serta memprakarsai kegiatan untuk memperkuat solidaritas masyarakat dan agen. menunjukkan bahwa program PHBM berkontribusi sekitar 26,9% terhadap pendapatan bulanan masyarakat.

Program ini memperkenalkan sistem bagi hasil dan mengakomodasi inisiatif masyarakat. Dukungan Perhutani tergambar dari kebebasan memilih masyarakat dalam memilih sharing area (lahan yang dialokasikan untuk dikelola petani) dan tanaman yang ditanam. Faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam memilih wilayah bagi hasil adalah kondisi geografis, dalam memilih tanaman adalah keterampilan petani, dan dalam mengalokasikan waktu kerja adalah prioritas petani.

Sementara, Sudirman Daeng Massiri, Adam Malik, Golar, Hamzari, Bramasto Nugroho dalam *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 26(2) (2020) berpendapat bahwa kinerja KPH belum optimal dalam mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Masalah ini dikaitkan dengan lemahnya kapasitas kelembagaan KPH. Beberapa aspek kelembagaan perlu ditingkatkan, termasuk memperkuat kapasitasnya di tingkat resor, memenuhi kebutuhan dan peningkatan kapasitas staf penyuluh, serta menyediakan mekanisme hukum untuk pengelolaan keuangan untuk memfasilitasi kegiatan bisnis dan kerjasamanya. Kebutuhan prioritas ini dipengaruhi oleh masalah birokrasi pemerintah. Untuk itu diperlukan perumusan kebijakan yang mengatur penguatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di kawasan KPH yang mendukung tujuan kemandirian KPH.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya dan peraturan yang dibahas diatas maka penulis mencoba untuk meneliti sebuah kajian mengenai *Community*

Based Forest Management dimana pengelola Kawasan Suaka Margasatwa Dangku memberikan kesempatan bagi masyarakat yang sudah terlanjur membuka lahan di lokasi hutan Suaka Margasatwa Dangku, kemudian terbentuk dalam Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK). Alasan tersebut dijadikan dasar sangat pentingnya dilakukan penelitian terhadap gangguan yang ada pada Kawasan suaka margasatwa dangku serta mengetahui peran masyarakat atau kelompok tani hutan konservasi dalam menjaga hutan suaka margasatwa dangku. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengangkat fenomena terkait untuk mendapatkan jawaban dari sisi perspektif akademis dengan judul **“Implementasi *Community Based Forest Management (CBFM)* pada Kemitraan Konservasi Dalam Pelestarian Hutan Suaka Margasatwa Dangku di Kabupaten Musi Banyuasin”**

1.2. Fokus Penelitian

Batasan penelitian terkait dengan objek penelitian secara khusus dijelaskan pada poin-poin berikut:

1. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Hutan Suaka Margasatwa Dangku di Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Informan pada penelitian ini adalah masyarakat tergabung dengan kemitraan konservasi di Hutan SM Dangku, BKSDA Resor Dangku dan Kepala Desa yang menaungi kelompok kemitraan konservasi
3. Evaluasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk menjaga kelestarian Hutan Suaka Margasatwa Dangku

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dan fenomena permasalahan yang terjadi di kawasan hutan suaka margasatwa dangku, maka perlu adanya suatu kajian yang mengangkat topik penelitian **“Implementasi *Community Based Forest Management (CBFM)* pada Kemitraan Konservasi Dalam Pelestarian Hutan Suaka Margasatwa Dangku di Kabupaten Musi Banyuasin”**. Oleh sebab itu, agar hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap khasanah keilmuan yang dapat dikembangkan lebih lanjut, maka penulis merasa perlu membuat perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan:

1. Apa saja jenis-jenis pemanfaatan dan pengembangan Hutan Suaka Margasatwa Dangku terkait dengan pelibatan masyarakat?

2. Bagaimanakah implementasi *Comunity Based Forest Management* dalam menjaga pelestarian Hutan Suaka Margasatwa Dangku?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian, maka tujuan penelitian diarahkan sebagai persepsi yang mampu menguraikan pemecahan pernyataan dalam perumusan masalah sesuai dengan keadaan yang dapat dibuktikan secara obyektif dan relevan.

1. Mengidentifikasi apa saja jenis-jenis pemanfaatan dan pengembangan Hutan Suaka Margasatwa Dangku terkait dengan pelibatan masyarakat.
2. Menerapkan *Comunity Based Forest Management* untuk menjaga kelestarian Hutan Suaka Margasatwa Dangku.

1.5. Manfaat Penelitian

Menurut hemat penulis, terlepas dari kekurangannya, hasil penelitian nantinya akan memberi manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan dan memiliki kesamaan concern terhadap topik yang sama atau sejenis, baik sebagai tambahan wawasan pengetahuan yang dapat menginspirasi bagi siapa saja yang tertarik untuk mengembangkannya lebih lanjut, atau juga bagi mereka yang memerlukan referensi untuk keperluan akademis maupun keperluan praktis yang relevan dengan hasil penelitian ini. Jadi manfaat dari hasil penelitian ini penulis bagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari sisi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelolaan berbasis masyarakat yang lebih efektif dalam menunjang kelestarian Hutan Suaka Margasatwa Dangku serta memiliki daya antisipasi yang cukup terhadap perubahan, dengan fleksibilitas yang memadai.
 - b. Mendorong penelitian selanjutnya untuk mengembangkan ilmu manajemen lingkungan, khususnya pengelolaan lingkungan hutan yang lebih lengkap.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah.

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang berarti bagi para pemangku kebijakan, khususnya dalam hal implementasi strategi dan penentuan kebijakan berkenaan dengan pengelolaan dan pemeliharaan hutan

suaka margasatwa dangku.

- b. Bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan konservasi dalam hal memahami karakteristik, preferensi, dan ekspektasi serta perilaku yang sebaiknya diimplementasikan.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik berupa verifikasi maupun kritik dan saran yang dimanifestasikan dalam bentuk penelitian lanjutan dimasa yang akan datang.

1.6. State of The Art

Adapun *State of the art* pada penelitian ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.1 *State Of The Art*

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
2022	Imelda	Strategi Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan Pada Gapoktan Hutan Kemasayarakatan Tandung Billa Di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo (The Strategy Of Development Of The Various Efforts Of Forestry At The Association Of Community Forest Tandung Billa In West Wara District Palopo City)	Deskriptif kualitatif. Pengolahan data Yang dilakukan dengan metode analisis SWOT	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis SWOT maka strategi pengembangan Aneka Usaha Kehutanan pada pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu berada pada kuadran I (satu) yang berarti mempunyai Strategi Agresif (Positif - Positif). Dimana nilai (S – W) yaitu 2,03 lebih besar dari nilai (O – T) yaitu 1,71. Sedangkan pengolahan data dengan menggunakan analisis SWOT
2020	Simatupang A.R., A.Rasya d, S.H.Siregar	Strategi Pengelolaan Kawasan Suaka	Pendekatan kualitatif dengan metode	Terhadap komponen-komponen yang sangat penting dalam pengembangan

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
		Margasatwa Balai Raja Berdasarkan Perubahan Tutupan Lahan	survei Selanjutnya dilakukan analisis SWOT	berdasarkan unsur- unsur SWOT pada matriks. Strategi yang telah disusun dan dirangking berdasarkan analisis SWOT terdapat lima strategi dengan rangking tertinggi. 5 strategi tersebut adalah sebagai berikut : 1) meningkatkan sinergisitas dan kerjasama pengelolaan kawasan yang meliputi, batas kawasan, pelestarian flora dan fauna serta penyadaran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, 2) meningkatkan keterlibatan pihak- pihak terkait, dalam pengelolaan kawasan mengalihkan hak milik dan dengan demikian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya hutan. Ini telah dianggap sebagai cara untuk menciptakan peluang baru bagi inclusion orang hutan karena perubahan dalam hak hukum akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan hak atas tanah dari mana mereka telah dikecualikan secara historis. Visi akses ke hak milik sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial didasarkan seperti yang ditunjukkan

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				<p>sebelumnya dalam makalah ini tentang teori distribusi, yang membatasi keadilan sosial hanya pada distribusi manfaat yang adil. Namun, tulisan ini menunjukkan bahwa niat tersebut gagal dalam implementasi praktis dari berbagai kebijakan. Studi kasus dari tiga provinsi Indonesia dalam makalah ini menunjukkan bahwa kebijakan CBFM sering mengadopsi prinsip keadilan sosial melalui tujuan yang mapan yaitu redistribusi manfaat dan pengakuan hak. Namun, kebijakan ini sebagian besar mengabaikan aspek pengakuan dan partisipasi dan, oleh karena itu, gagal mencapai tujuan utama pemberdayaan dan keadilan sosial. CBFM dianggap oleh pejabat pemerintah sebagai alat untuk menyelesaikan konflik kepemilikan hutan dan melegalkan pendudukan hutan oleh masyarakat. Ini dianggap sebagai solusi untuk masalah pengelolaan kehutanan yang kompleks dari deforestasi, konflik dan kemiskinan. Keinginan untuk berbagi beban tanggung jawab dalam melestarikan hutan adalah salah satu alasan di balik niat pemerintah untuk</p>

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				<p>menerapkan undang-undang CBFM daripada keinginan untuk memperkuat keamanan penguasaan hutan masyarakat (Colchester et al. 2003). Analisis menunjukkan bahwa CBFM terutama dilihat oleh para pejabat sebagai solusi untuk konflik atas lahan hutan dan hanya sekunder sebagai alat untuk pemberdayaan. Dengan demikian, lebih sering diterima secara 'kebetulan' daripada karena memahami manfaat kolaborasi dan/atau perbaikan tata kelola hutan. Masyarakat yang berpartisipasi tunduk pada pembatasan yang diberlakukan negara pada penentuan lokasi dan penggunaan lahan, di sana-kedepan, membatasi aspirasi pembangunan mereka. Umumnya, partisipasi selama fase persiapan lemah dan seringkali terbatas pada elit desa yang terhubung dengan baik. Setelah penerbitan hak manajemen, dukungan teknis tetap terbatas atau sama sekali kurang, yang menyebabkan hasil yang buruk dari inisiatif ikatan komunikasi. Orang-orang dibiarkan sendiri dengan keterampilan finansial atau teknis atau bantuan</p>

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				<p>untuk menjalankan program secara efisien. Tulisan ini juga menggarisbawahi bahwa keadilan sosial tidak bisa begitu saja disampaikan dengan upaya mendistribusikan hak secara adil, dalam hal ini, hak guna lahan. Redistribusi hak hanya dapat melayani keadilan sosial jika muncul dari proses musyawarah yang adil yang mengakui identitas, sejarah, aspirasi dan visi tertentu dari orang-orang yang terlibat dan gagasan budaya tertentu dan lingkungan memahami- yang memberi makna bagi mereka. Sistem manajemen sumber daya hanya akan alifies sebagai 'berbasis komunitas' jika aturan untuk alokasi sumber daya dan 'manajemen' ditetapkan terutama (meskipun tidak secara eksklusif) oleh komunitas itu sendiri (Lynch dan Talbott 1995). Sebuah inisiatif tidak memenuhi syarat sebagai pengelolaan hutan kemasyarakatan jika hanya dipaksakan pada, atau diberikan kepada, masyarakat oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dan mereka, mengendalikan tanah yang disengketakan atau mendapatkan akses ke donor uang. Kegiatan</p>

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				yang diprakarsai secara eksternal dengan berbagai tingkat partisipasi masyarakat tidak boleh disebut sebagai berbasis masyarakat (Li 2007).
2020	Eko Priyo Purnomo, Rijal Ramdani, Lubna Salsabila & Jin-Wook Choi	<i>Challenges of community-based forest management with local institutional differences between South Korea and Indonesia</i>	Metode triangulasi digunakan untuk pengumpulan dan analisis data.	Hasilnya, penelitian ini mengembangkan teori tentang keberhasilan pengembangan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan rekomendasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah dan nasional. Pemerintah Indonesia dapat belajar dari keberhasilan Pemerintah Korea dalam menerapkan keberlanjutan CBFM dan Mengartikulasikan strategi lembaga lokal.
2019	Ferdinal Asmin, Dudung Darusman, Iin Ichwandini and Didik Suharjito	<i>Mainstreaming community-based forest management in West Sumatra: Social forestry arguments, support, and implementation</i>	Analisis yang digunakan adalah kategorisasi dan koding, analisis historis, analisis dokumen, dan analisis kebijakan deskriptif.	Hasilnya, penelitian ini mengembangkan teori tentang keberhasilan pengembangan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan rekomendasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah dan nasional. Pemerintah Indonesia dapat belajar dari keberhasilan Pemerintah Korea dalam menerapkan keberlanjutan CBFM dan Mengartikulasikan strategi lembaga lokal.

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
2020	Sudirman Daeng Massiri, Adam Malik, Golar, Hamzari, Bramasto Nugroho	<i>Institutional Capacity of Forest Management Unit in Promoting Sustainable Community Based Forest Management. Case Study of Forest Management Unit in Central Sulawesi Province, Indonesia</i>	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif berbasis masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.	Kajian menunjukkan bahwa kinerja KPH belum optimal dalam mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Masalah ini dikaitkan dengan lemahnya kapasitas kelembagaan KPH. Beberapa aspek kelembagaan perlu ditingkatkan, termasuk memperkuat kapasitasnya di tingkat resor, memenuhi kebutuhan dan peningkatan kapasitas staf penyuluh, serta menyediakan mekanisme hukum untuk pengelolaan keuangan untuk memfasilitasi kegiatan bisnis dan kerjasamanya. Kebutuhan prioritas ini dipengaruhi oleh masalah birokrasi pemerintah. Untuk itu diperlukan perumusan kebijakan yang mengatur penguatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di kawasan KPH yang mendukung tujuan kemandirian KPH.
2019	Ary Widiyanto	<i>Factors Influencing Farmers Decision In Community-Based Forest Management Program, Kph Ciamis, West Java</i>	Pendekatan deduktif digunakan dengan metode kuantitatif dan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PHBM berkontribusi sekitar 26,9% terhadap pendapatan bulanan masyarakat. Program ini memperkenalkan sistem bagi hasil dan mengakomodasi inisiatif masyarakat. Dukungan Perhutani tergambar dari kebebasan memilih

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				masyarakat dalam memilih sharing area (lahan yang dialokasikan untuk dikelola petani) dan tanaman yang ditanam. Faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam memilih wilayah bagi hasil adalah kondisi geografis, dalam memilih tanaman adalah keterampilan petani, dan dalam mengalokasikan waktu kerja adalah prioritas petani.
2021	M ~u singo Tito E. Mbuvi , James B. Kungu	<i>A transfori traditional community based forest management: the case of Loita community forest, Kenya</i>	Penelitian deskriptif kaulitatif	Survei menunjukkan bahwa suku Loitan adalah suku dominan yang mewakili 97,5% dari 122 responden dengan kehadiran komunitas lain yang dapat diabaikan, termasuk Kalenjin, Luhya, dan Somalia, masing-masing sebesar 0,8%. Komunitas migran menjadi indikasi bahwa komunitas lain mulai bermigrasi ke daerah tersebut. Focus Group Discussion menunjukkan bahwa komunitas migran adalah penjaga toko, karyawan seperti tenaga medis, guru, dan petani. Penyelesaian komunitas migran dapat menandakan dimulainya keterpurukan mereka tentang Bagaimana masyarakat berhubungan dan menggunakan hutan. Pekerjaan utama di Loita adalah pertanian

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				<p>dan peternakan. Meskipun pertukangan tidak didakwakan, itu terlihat di wisma Oboibon. Entasikira memiliki toko pertukangan, dan proyek telah memulai pusat pelatihan kejuruan yang menargetkan pertukangan kayu, di antara keterampilan lainnya, pada tahun 2016 yang disebutkan selama FGD. Inisiatif ini akan memiliki transformasi dalam cara masyarakat mengakses dan memanfaatkan hutan. <i>Focus Group Discussion</i> menunjukkan bahwa keluarga yang tinggal di hutan memiliki rumah tangga di luar hutan, dan anggota rumah tangga yang dewasa membangun rumah mereka sebagian besar di hutan. Masyarakat memiliki tingkat buta huruf yang sangat tinggi. Dari 122 responden rumah tangga, 61,5% buta huruf, 22,1% telah mencapai tingkat pendidikan dasar, 13,1% memperoleh sekolah menengah, 3,3% telah memperoleh diploma, dan tidak ada yang memiliki Pendidikan universitas. Keterampilan yang rendah dapat menyebabkan masyarakat lebih mengandalkan hutan yang menyebabkan degradasi tinggi.</p>

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				<p>Alasan desentralisasi tata kelola hutan di Kenya dan mengundang pemangku kepentingan di hutan Loita Sementara di tingkat nasional, pembuat kebijakan mengindikasikan bahwa desentralisasi dimulai karena memburuknya kondisi hutan dan sumber daya yang tidak memadai, yang menyebabkan berkurangnya sumber daya hutan (23%) dan kegagalan komando dan kontrol. Di Loita, alasan Oloibon mengundang Pemangku kepentingan lain untuk berpartisipasi dalam pengelolaan LCF adalah untuk memperkenalkan perencanaan dan mengundang pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan sistem tata kelola masyarakat. Beberapa faktor nasional pendukung desentralisasi di sektor kehutanan diterapkan pada LCF.</p>
2020	M R Frimadani	<i>The implementati on of community-based forest management (CBFM) schemes within the protection forest management</i>	Deskriptif kualitatif	<p>Studi ini menyimpulkan bahwa praktik CBFM harus secara konsisten mendorong kelembagaan lokal sebagai inti dari pengelolaan hutan, sebagaimana dinyatakan dalam rencana jangka panjang PFMU alih-alih mendirikan lembaga baru. Oleh karena itu,</p>

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
		<i>unit (PFMU) Sijunjung, Indonesia</i>		kelembagaan lokal harus diperkuat dan mendorong sinergita antar pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan bagian kecil yang menekankan bahwa kelembagaan berperan dalam menentukan perilaku individu masyarakat di hutan, menentukan tindakan kolektif masyarakat dalam memanfaatkan hutan secara lestari atau ekstraktif.
2009	Kurniawati Ilmi	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Paliyan kabupaten Gunungkidul	Penelitian dilakukan dengan metode penelitian survey	Dari aspek masyarakat dan pemerintah tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah cukup berhasil. Sedangkan dari aspek swasta (proyek) tingkat keberhasilan pemberdayaan dilihat dari adanya dukungan penuh masyarakat sehingga prosentase hidup tanaman mencapai 94%. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah ketergantungan masyarakat terhadap hutan, sumber daya manusia, proses pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan proyek.
2021	Aileen D Tacbalan	<i>Community Based Forest Management Program Assessment in San Francisco,</i>	Metode deskriptif	Temuan penelitian mengungkapkan bahwa petani- penerima manfaat CBFMP adalah setengah baya, menikah, kebanyakan perempuan

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
		<i>Southern Leyte, Philippines</i>		<p>dan telah mencapai tingkat dasar pendidikan formal. Mereka memiliki pengalaman bertani selama bertahun-tahun sebagai penggarap atau penyewa dan memiliki luas lahan hutan yang cukup besar. CBFMP telah meningkatkan pendapatan penerima manfaat dan telah memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi mereka. Para penerima manfaat sangat tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan jika dapat meramalkan manfaat setelahnya dan kurangnya modal untuk membiayai operasi pertanian adalah masalah utama yang dihadapi oleh petani-penerima manfaat. Oleh karena itu, rekomendasi berikut disarankan: Ada kebutuhan bagi DENR untuk menugaskan pekerja pengembangan masyarakat berbasis barangay penuh waktu di CBFMP untuk mempromosikan akses ke penerima manfaat proyek dan mengatasi kekhawatiran mereka dari waktu ke waktu. DENR harus mendorong penerima manfaat CBFMP untuk membentuk koperasi</p>

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				<p>kredit, dengan cara ini mereka dapat memanfaatkan bantuan kredit yang lebih baik. Pelatihan tentang pengolahan/ pengawetan makanan harus dilakukan di antara penerima manfaat karena kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Housewives dapat membantu menambah pendapatan keluarga mereka dari pelatihan mata pencaharian ini. Memperluas cakupan CBFMP-nya dapat menghasilkan masyarakat pedesaan yang jauh lebih baik dan pengelolaan hutan hujan/ daerah aliran sungai di komunitas tersebut.</p>
2016	Swati Negi, Thu Thuy Pham, Bhaskar Karky and Claude Garcia	<i>Role of Community and User Attributes in Collective Action: Case Study of Community-Based Forest Management in Nepal</i>	Analisis Statistik	<p>Hasil menunjukkan bahwa di antara variabel yang diteliti, ukuran kelompok (jumlah pengguna hutan yang berafiliasi dengan hutan rakyat) dan persepsi pengelolaan hutan rakyat mereka merupakan prediktor kuat partisipasi pengguna hutan dalam pengelolaan hutan rakyat. Ketimpangan pendapatan dan keragaman etnis ditemukan tidak memiliki hubungan yang signifikan. Namun, ketimpangan lahan ditemukan menurunkan partisipasi dalam</p>

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				<p>pengelolaan dan pemanfaatan hutan rakyat. Atribut komunitas dan pengguna ini memainkan peran penting dalam keberhasilan tindakan kolektif dan dapat bervariasi dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Oleh karena itu mereka perlu dipertimbangkan dengan baik oleh para praktisi sebelum intervensi proyek berbasis masyarakat untuk merangsang tindakan kolektif yang berhasil.</p>
2020	Mucahid Mustafa Bayrak, Lawal Moham me dMarafa	<i>REDD+ as a Vehicle for Community-Based Forest Management ? Critical Insights from Vietnam</i>	Metode Q-squared Hulme, Metode kualitatif,	<p>Temuan dalam penelitian kami menunjukkan bahwa dalam kasus UN-REDD di Bao Thuan, REDD+ sebagian besar diimplementasikan dalam CBFMpra-existing dan lanskap lahan kelembagaan. UN-REDD dibangun diatas infrastruktur tata kelola hutan yang ada, dan tidak membawa perubahan signifikan pada mata pencaharian rumah tangga. FFI-REDD+di Hieu, di sisi lain, secara aktif berkontribusi pada pengembangan sistem dan infrastruktur CBFM serta alokasi lahan hutan kepada masyarakat sesuai dengan batas-batas adat mereka. CBFM memberdayakan masyarakat lokal di Hieu untuk membuat klaim</p>

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				<p>atas lahan hutan di komune mereka. Namun, dalam kedua studi kasus tersebut, REDD+ memang berkontribusi pada tingkat formalisasi yang lebih tinggi di antara rumah tangga lokal. Hal ini terjadi karena penguasaan lahan hutan, BSM, PADIATAPA, dan penerapan pengamanan sosial semuanya dilakukan melalui jalur formal dan dari aktor luar. Dalam keempat studi kasus, manfaat finansial langsung dari REDD+ dan CBFM kecil. Temuan kami menunjukkan bahwa skema REDD+ perlu mempertimbangkan faktor-faktor kunci seperti ketahanan pangan, temporalitas strategi mata pencaharian, kepemilikan lahan (hutan), gender, usia, ketergantungan hutan, dan marketisasi pada rumah tangga individu dengan lebih mempertimbangkan.</p> <p>Hingga saat ini REDD+ di Vietnam belum dibuat khusus' untuk masing-masing rumah tangga. Hal ini semakin diperumit oleh pendekatan 'komando dan kontrol Negara Vietnam terhadap CBFM yang menghalangi masyarakat lokal untuk mengembangkan inisiatif CBFM berbasis akar rumput atau</p>

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				menghidupkan kembali CBFM 'adat'. Akhirnya, diharapkan tipologi tentang CBFM pada tingkat meso- dan mikro dalam penelitian ini dapat mendukung pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan untuk cukup 'lokal-ize' atau menanamkan REDD+ dalam lanskap tata kelola hutan lokal dan skema CBFM yang ada di Vietnam dan negara-negara lain (REDD+).
2017	Muhdian, Prasetya Darmawan	Strategi Pengembangan Perhutanan Sosial Sumatera Barat (Studi Kasus Kabupaten Pasaman)	Deskriptif kualitatif	Penelitian ini kemudian menghasilkan 9 (sembilan) strategi utama yang diprioritaskan kepada 4 (empat) strategi, salah satunya adalah peningkatan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan perekonomian serta kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan system pengetahuan, transfer teknologi dan pendidikan kehutanan. Untuk melaksanakan strategi tersebut dirumuskan 5 (lima) arah kebijakan guna mendorong proses pembangunan perhutanan sosial di Kabupaten Pasaman.
2017	Santika Et al.	<i>Community forest management in Indonesia: Avoided deforestation</i>	Matching Spasial	Asumsi yang mungkin dari pihak berwenang adalah bahwa kapasitas manajemen dan effort di bawah skema HD relatif konsisten dalam konteks

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
		<i>in the context of anthropogenic and climate complexities</i>		<p>different. Hasil kami menunjukkan bahwa berbagai tingkat manajemen harus diterapkan di daerah-daerah dengan tingkat tekanan manusia yang berbeda. Hal ini dapat direpresentasikan dalam kualitas teknis dalam HD development, jumlah financing, dan dukungan untuk kepemimpinan lokal. Singkatnya, di sini kami menunjukkan bahwa berdasarkan tujuan menghindari deforestasi, HD berkinerja baik. Tekanan anthropogenic yang kuat dan kompleks serta iklim ekstrem adalah tantangan utama bagi manajemen HD di masa depan. Analisis kami adalah langkah pertama menuju kinerja keseluruhan dari skema kehutanan masyarakat ini di bawah pengaturan multi-objektif. Dengan perkembangan pesat di Indonesia dan masyarakat sipil yang sedang berkembang, kinerja HD dan skema kehutanan community lainnya, seperti Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Adat, akan diperebutkan. Memahami bagaimana masing-masing skema ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, kesejahteraan dan mata pencaharian mereka, dan lingkungan</p>

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				alam, adalah imperative untuk menginformasikan strategi pembangunan berkelanjutan yang mencapai kelipatan ini Tujuan.
2021	Irfan Budi Santoso, Drs. Zainal Hidayat. M A	Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Hutan Potorono Desa Sambak Bkph Magelang Kph Kedu Utara Divisi Regional Jawa Tengah	Metode kualitatif dengan jenis deskriptif	Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Sambak dilakukan Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat yang diwujudkan dengan program kerja LMDH Wana Hijau Lestari. Namun dalam pelaksanaannya PHBM Desa Sambak masih terdapat beberapa permasalahan yakni sumber daya manusia yang meliputi masyarakat yang masih tertutup terhadap hal baru dan pengurus LMDH yang kurang aktif, koordinasi yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam kegiatan PHBM masih terjadi pelaksanaan misskomunikasi, PHBM yang belum memiliki kejelasan sumber anggaran dan kondisi lingkungan masyarakat yang tradisional sehingga memunculkan stigma yang mempengaruhi PHBM.
2022	Tommy Septanus Christian	<i>Implementatio n Program Community</i>	Metode kualitatif	Hasil dari implementasi program yang dilakukan di Kesatuan Pengelolaan

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
		<i>Based Forest Management Oleh Asian Forest Cooperation Organization Di Batu Tegi Lampung Tahun 2017-2020</i>		Hutan Batu Tegi Provinsi Lampung oleh AFoCo menunjukkan bahwa kelompok tani hingga masyarakat merasakan perkembangan dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, dari pemilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan, kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman, serta pola tanam yang menjadi lebih baik. Bahkan permasalahan mengenai tata batas lahan garapan disetiap wilayah kelompok tani menjadi lebih jelas berkat adanya penggunaan teknologi GIS melalui GPS, hal ini membuat tidak adanya tumpang tindih kepemilikan lahan garapan.
2016	M. Imam Arifandy *) , Martua Sihaloho	Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan (<i>Effectiveness of Community Based Forest Management as Forest Resources Conflict Resolution</i>)	Metode kualitatif	Konflik pengelolaan sumber daya hutan di Desa Kalimendong telah terjadi sejak tahun 1998 akibat ketidakstabilan kondisi negara pada saat itu. Situasi tidak kondusif kemudian mengakibatkan banyaknya kasus penjarahan hutan termasuk hutan negara di wilayah Desa Kalimendong sehingga menyebabkan kerusakan hutan yang besar. Konflik antara masyarakat dengan Perhutani tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2004, ketika Perhutani melakukan

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				<p>penangkapan oknum masyarakat yang melakukan penjarahan kayu, yang kemudian berujung pada pembakaran pos Tempat Pengumpulan Getah (TPG) milik Perhutani. Berdasarkan wujud konflik yang terjadi, konflik di Desa Kalimendong berwujud emerging dan manifest, sedangkan menurut levelnya, konflik yang terjadi adalah konflik vertikal. Berdasarkan sumbernya, konflik yang terjadi di Desa Kalimendong bersumber dari tataran perbedaan kepentingan, perbedaan persepsi, dan perbedaan hak kepemilikan. Implementasi PHBM di Desa Kalimendong pada tahun 2002 dapat menjadi strategi resolusi konflik, proses penyelesaian konflik melalui implementasi PHBM di Desa Kalimendong adalah strategi penyelesaian konflik secara Problem Solving, yaitu, penyelesaian konflik yang menghasilkan kepuasan, melalui akomodasi setiap kepentingan bagi kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan Perhutani. Strategi resolusi konflik yang</p>

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				<p>diterapkan kemudian menghasilkan; 1) penurunan grafik pencurian kayu, 2) adanya PHBM yang dapat menjadikan masyarakat terlibat secara aktif melalui program-program dalam bentuk kerja sama dalam mengelola dan mengawasi hutan secara bersama-sama dengan pihak Perhutani, 3) selain bekerja sama dengan Perhutani, masyarakat juga memiliki usaha mandiri yang dinaungi LMDH dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, 4) adanya sistem bagi hasil (sharing profit) sebagai bentuk kerja sama pemanfaatan hasil antara Perhutani dengan masyarakat Desa Kalimendong, 5) sistem kerja PHBM yang partisipatif dalam setiap kegiatannya, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan, serta tahap monitoring dan evaluasi sehingga kepentingan semua pihak yang terlibat dapat terakomodasi dengan baik, 6) adanya berbagai prestasi LMDH Rimba Mulya sebagai LMDH terbaik di tingkat provinsi, maupun tingkat nasional,(7) memperbaiki komunikasi serta kerja sama antara</p>

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				<p>Perhutani dan masyarakat baik dalam hal pengelolaan hutan, maupun dalam pengawasan hutan, (8) memberikan dampak perbaikan ekologi yang dirasakan oleh masyarakat. Berbagai bentuk implementasi PHBM yang dilakukan sebagai resolusi konflik tidak serta merta menghilangkan konflik di Kawasan Desa Kalimendong. Adanya PHBM kemudian memunculkan konflik baru antara Perhutani dan masyarakat, konflik yang terjadi dalam wujud konflik emerging, ketika kepentingan salah satu pihak tidak terakomodasi dengan baik atau yang disebut dengan Lumpung it, yaitu kegagalan salah satu pihak untuk menekankan tuntutan, dan hubungan dengan pihak lawan terus berlanjut. Proses Lumpung it yang dilakukan LMDH kepada Perhutani adalah berupa kegagalan LMDH untuk mengakomodasi kepentingan anggotanya agar kenaikan pembayaran sharing tidak jadi dilakukan oleh Perhutani, namun pihak Perhutani tetap melakukan kenaikan sharing dan hubungan Perhutani dengan</p>

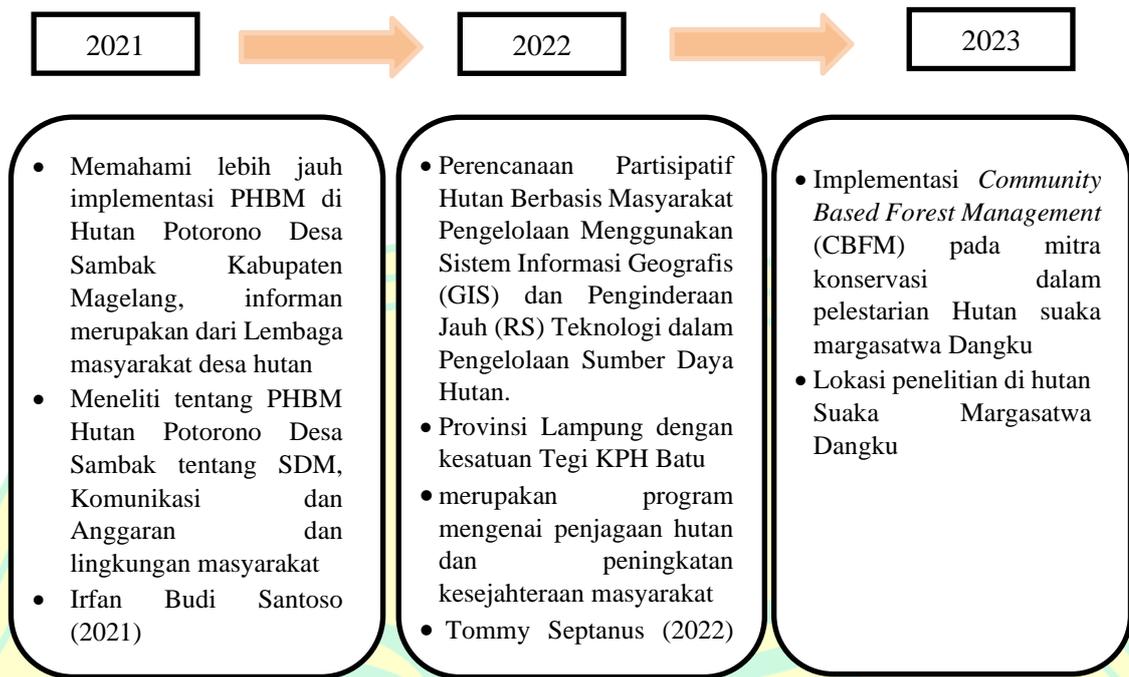
Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				<p>masyarakat tetap berjalan. Anggota LMDH Rimba Mulya yang menjadi responden pada penelitian ini memiliki karakteristik, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) berpendidikan rendah, 2) berada pada umur produktif, 3) mayoritas anggota adalah laki-laki, dan minoritas adalah perempuan, 4) memiliki tingkat pendapatan sedang, 5) memiliki jumlah tanggungan sedang, 6) memiliki tingkat kepemilikan lahan sebelum PHBM sedang, 7) memiliki tingkat kepemilikan lahan sesudah PHBM rendah, 8) memiliki luas petak lahan PHBM rendah, 9) mayoritas memiliki pekerjaan pertanian, dan minoritas pekerjaan non-pertanian. <p>Berdasarkan uji statistik, dari semua karakteristik, ditemukan hanya satu karakteristik yang berhubungan dengan efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik, yaitu karakteristik jumlah tanggungan individu anggota LMDH Rimba Mulya berhubungan negatif terhadap efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik, sementara karakteristik lainnya</p>

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				secara statistik tidak memiliki hubungan dengan efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik, temuan di lapang menghasilkan bahwa semakin tinggi jumlah tanggungan individu maka efektivitas PHBM sebagai resolusi konflik akan semakin rendah, hal tersebut diakibatkan karena dalam kegiatan PHBM, masyarakat dituntut memiliki banyak waktu untuk mengikuti serangkaian Kegiatan PHBM, sehingga bagi individu yang memiliki jumlah tanggungan tinggi, maka akan memiliki sedikit waktu untuk mengikuti kegiatan PHBM.

Kebaruan yang dimiliki penelitian ini adalah konsep strategi *Community Based Forest Management* yang diterapkan pada pengelolaan hutan suaka margasatwa khususnya dikawasan dangku yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kehidupan masyarakat sekitar dengan memegang teguh akan nilai dan perilaku yang berkaitan dengan kesadaran lingkungan dalam menjaga kawasan hutan dari berbagai potensi kerusakan.

1.7. Road Map Penelitian

Adapun road map penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 1.5 Road Map Penelitian

